

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan akhir dari kebijakan makro ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat, yang salah satunya melalui perwujudan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata sekaligus berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (sukirno, 2004). Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan meningkatkan pertumbuhan itu tidak mudah. Kendala - kendala yang dialami oleh setiap negara tersebut seperti, kemiskinan, harapan hidup yang rendah, distribusi pendapatan yang tidak merata. Banyak negara mengalami keterbatasan, sebab pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa hal saja seperti, investasi, ekspor, impor, sumber daya alam, pengeluaran pemerintahan.

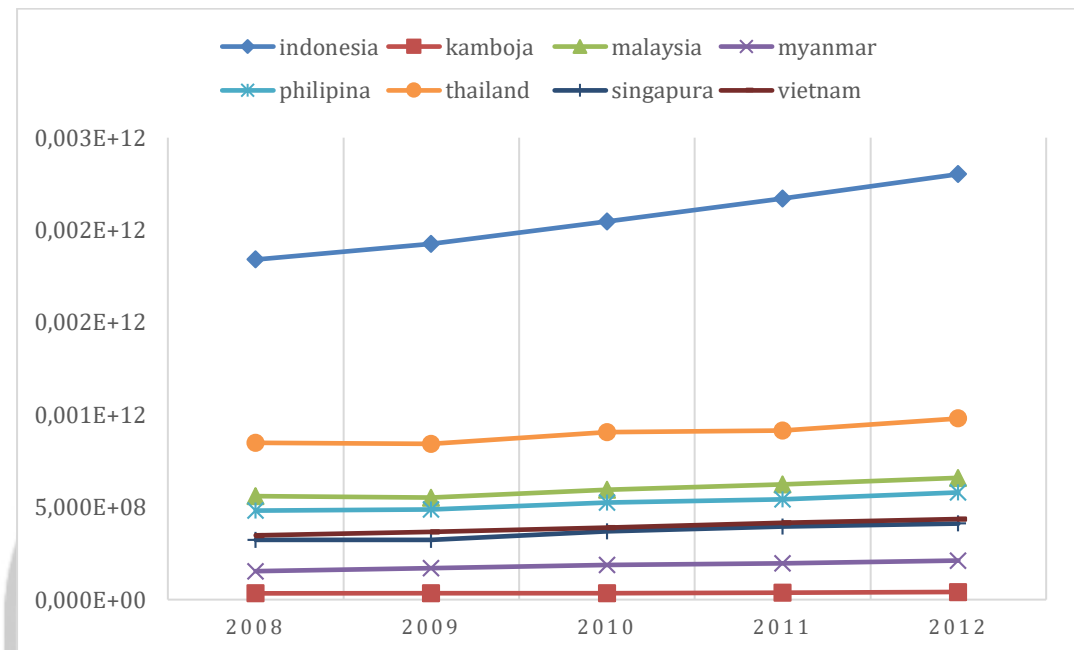
Negara yang berpendapatan rendah dengan pertumbuhan yang rendah sering berada dalam kesulitan karena tidak mampu untuk menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif (Ackerman, 2006). Beberapa negara yang diberkahi dengan sumber daya alam mencatat rekor tingkat pertumbuhan yang buruk.

Masalah yang dihadapi ini tidak lepas dari tanggung jawab negara sebagai manajer. Tata kelola di suatu negara dapat dikatakan baik apabila dapat mengalokasikan dan mengelola segenap sumber daya sedemikian rupa guna

mengatasi berbagai persoalan negara tersebut (Basri dan Munandar 2009, 203-222). Kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun mikro, dipengaruhi pula oleh aspek kelembagaan (institutional) dan lingkungan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kelembagaan suatu negara adalah tingkat korupsi artinya tingkat korupsi diyakini dapat mempengaruhi kinerja ekonomi. Dalam mengatur suatu negara, tidak lepas dari tindakan yang menyimpang yaitu tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku, mencari jalan pintas untuk kepentingan sendiri. Korupsi merupakan gejala bahwa telah terjadi sesuatu yang salah dalam manajemen negara. Institusi-institusi yang dirancang untuk mengatur hubungan antara negara dan penduduk malah digunakan untuk memperkaya diri dan mendapat tambahan keuntungan bagi yang korup (Ackerman, 2006:11)

Jika korupsi itu merupakan pertanda manajemen negara yang buruk, maka hal tersebut tentunya akan berpengaruh kepada performa ekonomi negara. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi bahwa performa ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari tingkat pertumbuhannya. Kawasan ASEAN merupakan kawasan yang merefleksikan negara yang sedang berkembang, ASEAN-8 terdiri dari beberapa negara yaitu, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura. Performa ekonomi di kawasan ini dapat dikatakan baik. Terlihat dari data yang didapat dari *world bank* ketika Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 tersebut sebenarnya bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk negara ASEAN yang memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi ditemukan hanya

beberapa negara saja yang ekonominya melemah. Dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :



Sumber : *World Bank* (2019)

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-8

Berdasarkan Gambar 1.1, bahwa pada tahun 2008, 2009 dan 2010 negara ASEAN-8 mengalami penurunan sebesar: Malaysia (8,488,629,439.6 US\$), Thailand (5,863,875,501.55 US\$) adanya jumlah penurunan ini merupakan pengaruh dari adanya krisis yang melanda. Sedangkan negara-negara lain kuat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya dan terus meningkat dari tahun ke tahunnya secara perlahan. Pertumbuhan yang terus meningkat secara perlahan ini ditakutkan menjadi cela bagi setiap politisi pemerintah melakukan kecurangan.

Maraknya situasi di Indonesia yang berhubungan dengan Ekonomi Politik juga, di mana Pendekatan ekonomi politik ini dipakai dan di coba dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi. Cara yang lazim digunakan oleh pihak yang

ingin mendapatkan keuntungan pribadi adalah korupsi. Dimana korupsi merupakan sebuah penyalahgunaan dari kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi telah menjadi isu dalam ilmu politik dan ilmu sosial dalam beberapa abad terakhir, namun masih sulit untuk menemukan pendekatan yang sistematis berdasarkan sains (Lambsdorff, 2007). Dari korupsi bisa dilihat bahwa adanya manajemen negara yang buruk, kurangnya pengawasan, dan sifat tamak dari si koruptor itu sendiri. Di lihat dari tabel yang menunjukkan indeks persepsi korupsi tahun 2017, ASEAN-8 yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja dan Singapura.

Tabel 1.1

Tabel Indeks Persepsi Korupsi

Negara	CPI	Peringkat
Singapore	84	6
Malaysia	47	62
Indonesia	37	96
Thailand	37	96
Filipina	34	111
Myanmar	30	130
Kamboja	21	161

Sumber: *Transparency International*, 2017.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia masih menunjukkan rapor yang buruk terlihat bahwa Indonesia menempati urutan ke 96 dengan indeks persepsi korupsi sebesar 37 (angka 100 untuk tidak ada korupsi sama sekali, angka 0 untuk terjadi korupsi di mana-mana) berada jauh di bawah negara

tetangga singapura yang menempati urutan ke 6 dengan indeks persepsi korupsi sebesar 84. Di antara Negara ASEAN-8 yang menduduki tempat paling bawah menurut *Transparency International* adalah Negara Kamboja dengan indeks persepsi korupsi sebesar 21 dan menempati peringkat ke 161. Menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah dan setiap jajarannya untuk bebas dari korupsi.

Perdebatan tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan masih berjalan sampai sekarang. Ekonom, sejarawan dan para ahli politik telah terlibat dalam debat yang panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum menyatakan bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Kebanyakan para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan. Korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan dipercaya memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan (Blackburn et al.; 2005).

Pada awal tahun 1970-an merupakan dekade di mana perspektif ekonomi politik telah mendapatkan perhatian khusus dari kalangan para akademisi, untuk diadopsi sebagai alat bantu analisa dalam menjelaskan realitas ekonomi dan politik di sebagian besar negara-negara berkembang. Bergeraknya pendulum orientasi pendekatan di kalangan para akademisi ini antara lain telah dipicu oleh rasa kecewa yang mendalam atas kenyataan bahwa konsep "*Benign and welfare maximising state*" yang banyak diadopsi pada dekade 1960-an, telah gagal pada tingkat realitas. Dalam kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya justru para pembuat kebijaksanaan dan penyelenggara pemerintah lainnya ternyata merupakan bagian dari *rent seeker*

(Rachbini, 2002). Waktu adalah uang, sehingga perusahaan dan perorangan akan membayar suap guna menghindari keterlambatan. Di banyak negara, telepon, paspor, SIM tidak dapat diperoleh dengan cepat tanpa penyuapan. Terkadang pelayanan hanya tersedia bagi mereka yang korup tetapi bukan bagi warga yang sabar dan jujur (Ackerman, 2000:19). Terkadang korupsi dikatakan sebagai *speed money*, untuk mempersingkat waktu sehingga lebih efisien (Huntington, 1968). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak sepenuhnya menurunkan tingkat pertumbuhan suatu negara. Swaleheen dan Stansel (2007) di dalam penelitiannya yang berjudul “*Economic Freedom, Corruption and Growth*”, mendapatkan hasil bahwa kegiatan korupsi mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ketika kebebasan ekonomi tinggi. Masalah korupsi merupakan masalah serius yang sedikit mendapatkan perhatian. Masalah korupsi perlu diteliti lebih lanjut karena pengaruhnya terhadap pertumbuhan suatu negara terutama di kawasan negara berkembang khususnya ASEAN. Oleh karena itu diperlukan studi lebih lanjut mengenai dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara yang tergabung dalam ASEAN-8 yaitu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja dan Myanmar

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Bagaimana hubungan indeks persepsi korupsi, investasi langsung dan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN-8 dalam Tahun 2008–2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji secara empiris pengaruh indeks persepsi korupsi, investasi langsung, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN-8 Tahun 2008 – 2017

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang dapat diambil: pertama adalah terdapat pengaruh yang signifikan positif antara indeks persepsi korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan. Ketiga adalah terdapat pengaruh positif antara *foreign direct investment* dan pertumbuhan ekonomi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi untuk memberi masukan kepada pihak – pihak terkait seperti otoritas pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun lembaga yang berwenang lainnya. Agar saling bekerjasama dalam melakukan kontrol dan pemberantasan korupsi.
- 2) Peneliti/Pembaca, sebagai bahan referensi, pembanding, dan memperkuat studi/ penelitian yang terkait dengan topik penelitian.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat dan terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan transaksi non-tunai, pengaruh transaksi non-tunai terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, variabel penelitian serta, model dan analisis data penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisa data, hasil penelitian yang diperoleh, pengujian hipotesis, dan interpretasi pembahasan sesuai dengan cakupan atau ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.